

Struktur dan Kultur Dominasi: Relasi Agensi dan Strukturasi dalam Pembentukan Kultur Prajurit TNI Angkatan Darat pada Era Reformasi

K.J. Sihotang

Mahasiswa Program Doktor pada Program Studi Kajian Budaya dan Media, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada.

Abstract

Institutionally, the Indonesian National Military (TNI) in the New Order era dominated the social and political system in Indonesia. The domination ended by the falling of the Soeharto regime and the emergence of the Reformation era.

Nevertheless, the TNI has not undertaken cultural reformation especially on the military-cultural personnel although institutionally it has done so. On the military-cultural personnel aspect, the TNI personnel culture is still dominated by the long-existing feudalistic. This work, therefore, focuses on the practices of discipline, loyalty and militancy as the three basics of the culture of the TNI personnel.

To discuss the issue, this project employs the agency and structure of Anthony Giddens and habitus of Pierre Bourdieu theories for analytical purposes.

Keywords : TNI AD, culture of Domination, Discipline, Loyalty and Militancy

Pendahuluan

Suasana peperangan pada masa melawan penjajah baik pada fase memperebutkan atau mempertahankan kemerdekaan merupakan konteks sosial-historis yang tidak bisa dipisahkan dari proses pembentukan kultur prajurit TNI yang bersifat dominatif. Pada masa perang, berbagai kelompok laskar rakyat yang menjadi cikal bakal prajurit TNI berjuang dengan penuh disiplin pada tugas, loyal pada negara dan militan pada misi memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan. Rasa terjajah, tertekan, terancam dan tertindas bersatu padu dengan

semangat untuk melepaskan diri dari segala macam bentuk penindasan dan penjajahan. Kondisi dan situasi tersebut merupakan faktor eksternal yang menciptakan terbentuknya disiplin, loyal dan militan dalam diri setiap laskar rakyat dan pejuang pada saat itu.

Tentu saja disiplin, loyal dan militan pada saat itu merupakan bentukan dalam perjuangan yang memang dibutuhkan dalam sebuah peperangan. Disiplin, loyal dan militan belum menjadi kultur prajurit profesional yang terstruktur secara institusional. Sehingga, pada masa perjuangan peperangan melawan penjajah, laskar dan

pejuang kemerdekaan menjadi identik dengan jiwa semangat berkorban, pantang menyerah, berani mati dan tanpa pamrih pangkat, jabatan atau imbalan.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa disiplin, loyalitas dan militansi para pejuang saat itu merupakan respon situasional yang bersifat reaktif dari suatu konteks perjuangan bersenjata melawan penjajah. Dalam konteks historis tersebut, disiplin, loyalitas dan militansi belum dapat dikatakan sebagai kultur keprajuritan, sebab merupakan tanggung jawab personal yang bersifat situasional. Kendati telah memberi pengaruh signifikan terhadap bobot perjuangan melawan penjajahan, namun sesuatu yang bersifat situasional tersebut sesungguhnya tidak kokoh, kurang stabil dan dapat berubah-ubah. Hal ini terjadi karena epistemologi kultural dari disiplin, loyalitas dan militansi pejuang tidak terstruktur dan terukur sehingga pada gilirannya benar-benar menjadi kultur prajurit di kemudian hari. Akibat lebih jauh, praktik disiplin, loyalitas dan militansi prajurit pada masa berikutnya berpotensi dimanfaatkan atau pada praktiknya bahkan ditentukan secara sepihak oleh sejumlah oknum prajurit TNI yang memiliki pangkat lebih tinggi. Pemanfaatan aspek disiplin, loyalitas dan militansi oleh atasan (Komandan) pada prajurit di bawahnya ini merupakan pintu masuk bagi terselenggaranya praktik dominasi.

Pada masa peperangan loyalitas pejuang dapat diartikan sebagai kesetiaan pada sesuatu dengan rasa cinta sehingga dengan rasa loyalitas yang tinggi seseorang merasa tidak perlu untuk mendapatkan imbalan dalam melakukan sesuatu. Sedangkan disiplin pejuang merupakan suatu syarat mutlak untuk mentaati semua peraturan yang berlaku, terutama di lingkungan militer dan semua perintah kedinasan dari atasan, baik mengenai

tugas pokok maupun tugas lainnya, dengan tertib, tepat dan sempurna. Adapun militansi pejuang merupakan semangat juang yang tidak mengenal menyerah, memegang teguh prinsip perjuangan dan rela berkorban demi negara tercinta, profesional, tahan menderita dan dekat serta dicintai rakyat.

Dalam kehidupan militer saat ini, prajurit tanpa loyalitas, disiplin dan militansi sama dengan suatu gerombolan yang bekerja tanpa tujuan dan sasaran yang bergerak liar tanpa hirarki yang sistematis. Kendati belum menjadi kultur personal pejuang kemerdekaan karena tidak ditopang oleh struktur yang sistematis, namun loyalitas, disiplin dan militansi pejuang tersebut diacu oleh prajurit TNI hingga saat ini. Ketiga hal tersebut meresap ke dalam jiwa seluruh prajurit TNI yang terbentuk melalui proses dialektis dan dinamis antara prajurit TNI dalam jangka waktu yang panjang dan berlangsung secara terus menerus. Proses tersebut melibatkan secara aktif prajurit TNI sebagai agen sosial dengan lingkungan sekitarnya yang pada gilirannya membentuk suatu struktur sosial. Agen atau pelaku adalah orang-orang yang kongkrit dalam arus suatu tindakan dan peristiwa. Struktur adalah berbagai aturan (*rules*) dan segenap sumberdaya (*resources*) yang terbentuk dan membentuk berbagai pengulangan praktik sosial dalam suatu keadaan (*setting*) ruang dan waktu tertentu.

Dengan demikian, agen atau pelaku dan struktur berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan karena merupakan dualitas yang ada sebagai hasil dari berbagai pengulangan praktik sosial. Praktik sosial dalam dialektika dan dinamika agen dan struktur inilah yang menjadi pokok pembahasan yang dibahas dalam penelitian ini. Dinamika serta dialektika agen dan struktur yang ada pada institusi TNI adalah satu elemen penting yang mendorong

penelitian ini sangat mendesak untuk dilakukan dengan pertimbangan kondisi TNI yang dituntut untuk semakin profesional seiring dengan tantangan dan hambatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Oleh sebab itu, ada dua pemikiran pokok dalam penelitian ini: *pertama*, membangun asumsi teoritisnya dengan anggapan bahwa seluruh kultur dalam diri prajurit TNI merupakan hasil dari relasi prajurit sebagai agen dan struktur berupa prinsip-prinsip aturan sebagai sarana dalam melakukan proses pengulangan tindakan sosial. Dalam perspektif ini, struktur tersebut bersifat memberdayakan (*enabling*) bukan mengekang (*constraining*).¹ Strukturasi mengandaikan adanya unsur timbal balik (dualitas) bukan terpisah (dualisme) antara agen dan struktur. Dalam sebuah struktur memungkinkan terjadinya berbagai praktik sosial (*social practices*). Obyektivitas sebuah struktur yang terdapat dalam teori strukturasi melekat tidak terpisahkan dalam tindakan atau praktik sosial itu sendiri.

Perspektif teoritik ini menarik dikemukakan, sebab mengandung kontradiksi. Di mana loyalitas, disiplin dan militansi prajurit TNI di seluruh institusi militer lekat dengan kultur loyal, disiplin dan militan. Situasi yang penuh dengan kesiagaan tempur menuntut setiap prajurit harus bersikap penuh loyalitas, disiplin tinggi dan militansi yang kuat. Selain itu, nilai yang terkandung dalam kultur tersebut merupakan varian vital bagi setiap organisasi militer di mana pun sebagai organ utama pertahanan dan keamanan sebuah negara.

Karena itu, sesungguhnya struktur tersebut tampak mengekang, mendominasi bahkan "menindas"² setiap prajurit sebagai agen yang berinteraksi dengan lingkungan militer sebagai sebuah struktur. Konteks ini sedikit menyimpang dari asumsi teori strukturasi yang diajukan Anthony Giddens (1995) yang beranggapan bahwa struktur itu bersifat memberdayakan (*enabling*), karena dibentuk oleh relasi para agensi dalam suatu ruang dan waktu yang dinamis. Dinamika agen dan struktur menunjukkan bahwa agen memiliki kontribusi aktif dalam membentuk sebuah kultur.

Kedua, membangun asumsi sosiologisnya dari pandangan bahwa loyalitas, disiplin dan militansi sebagai kultur yang tumbuh dalam diri prajurit TNI bersifat dominan bahkan "menindas". Dominasi tersebut bersifat kultural, menjelma sebagai perangkat aturan yang diakui sebagai sebuah identitas kultural yang kemudian diakui bersama sebagai sebuah peraturan. Terjadi semacam peristiwa perayaan terhadap suatu dominasi yang dilegitimasi secara institusional dan kemudian sah untuk diberlakukan. Sebab, loyalitas, disiplin dan militansi selain dibangun sebagai hasil strukturasi juga disusun di atas kelas sosial berupa pangkat dan jabatan dalam institusi TNI.

Ada kegelisahan akademik, apakah benar loyalitas, disiplin dan militansi, sebagai kultur prajurit TNI tersebut bersifat esensial ataukah hanya merupakan proses eksistensial dari suatu kondisi-kondisi tertentu dan pada waktu-waktu tertentu? Kegelisahan ini menstimulasi pemikiran-pemikiran akademik di mana berdasarkan

1 Lihat Giddens, 1995, yang menjelaskan teori strukturasi secara lebih rinci.

2 Kata "menindas" yang diberi tanda kutip menunjukkan bahwa budaya yang dimaksudkan merupakan sebuah model budaya yang kompleks sehingga penulis sulit menemukan kata yang tepat untuk mengungkapkannya. Oleh karena itu, kata "menindas" tersebut harus dimaknai secara kontekstual sesuai dengan maksud penelitian ini. Pada bagian selanjutnya, penulis juga menggunakan kata dominasi sebagai alternatif lain dari kata "menindas."

kondisi-kondisi yang terjadi pada institusi TNI seperti yang dipaparkan dalam bagian sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini, yaitu *mengapa kultur dominasi pada institusi TNI AD dapat terbentuk dan dipraktikkan sebagai suatu sistem yang sah?*

Teori Strukturasi Giddens dan Teori Habitus Boerdieu

Antony Giddens (1984) menawarkan gagasan teoritik tentang agen dan struktur dalam teori strukturasi sebagai bentuk sintesis dari ketegangan antara sejumlah aliran pemikiran sosial antara struktur fungsional dengan konstruksionisme fenomenologis yang memiliki asumsi teoritik yang berbeda tentang pembentukan struktur masyarakat. Pusat dari perbedaan asumsi teoritik tersebut bertumpu pada peran manusia sebagai aktor atau subjek sosial terhadap terbentuknya struktur sosial dan bagaimana relasi keduanya bekerja. Giddens membangun teori strukturasi dengan terlebih dahulu mengoreksi dan mengkritisi teori sosial sebelumnya yang penuh dengan ketegangan tersebut. Bagi Giddens, objek utama ilmu sosial bukanlah peran sosial seperti dalam fungsionalisme Parsons, bukan kode tersembunyi seperti terdapat dalam strukturalisme Levi-Strauss atau Ferdinand de Saussure, bukan pula keunikan-situasional seperti dalam interaksionisme Goffman, melainkan titik temu keduanya, yaitu praktik sosial yang berulang serta terpola dalam lintas ruang dan waktu.

Aktor dan struktur memang menjadi tema paling menonjol dalam pembahasan teori sosial modern kontemporer dan sering kali perbincangan tersebut disertai perbedaan bahkan ketegangan teoritik. Untuk menggambarkan perbedaan dan ketegangan tersebut dapat dikemukakan pandangan Comte yang dikenal sebagai

bapak sosiologi. Seperti yang dikutip oleh Veegar (1993: 18-20), ia berpendapat bahwa perubahan struktur sosial dalam masyarakat menyesuaikan dengan evolusi akal budi manusia, mengikuti evolusi sejarah manusia yang deterministik. Kecenderungan fungsionalisme Durkheim yang dikuatkan oleh Talcott Parsons mengemukakan bahwa struktur sosial menentukan peran-peran dan pola-pola perilaku tetap yang diharapkan dijalankan oleh setiap individu untuk memenuhi fungsi sosial menciptakan integrasi dan ketertiban di dalam sistem sosial tersebut (Veeger, 1993: 200-201). Sementara Marx memiliki anggapan lain, menurutnya individu memang aktor dalam perubahan sosial, namun ia tidak bebas sepenuhnya karena individu ditentukan dan terikat oleh lingkungan material dan sosial yang melingkupinya. Struktur (kelas) sosial terutama ekonomi menjadi situasi dan kondisi yang memungkinkannya perubahan tersebut (Johnson, 1981). Sedangkan Weber menafsirkan masyarakat berdasarkan pola-pola tindakan bermakna dari anggotanya (Campbell, 1994).

Berbagai ragam pendapat tersebut mengarah pada dualisme aktor dan struktur sosial yang mempengaruhi terbentuknya struktur sosial. Terhadap dualisme tersebut Giddens berpendapat bahwa pembentukan struktur sosial tidak hanya dipahami sebagai pembatas dan pengatur bagi aktor sosial tetapi memungkinkan menjadi medium (sarana) bagi aktor untuk berinteraksi. Struktur sosial disusun melalui tindakan aktor dan pada saat yang sama tindakan juga mewujudkan di dalam struktur (Giddens, 1976: 161). Giddens menyelesaikan perdebatan teoritik tersebut dengan berpegang pada asumsi bahwa tindakan manusia disebabkan oleh dorongan eksternal. Menurut Giddens, struktur bukan bersifat eksternal bagi individu melainkan lebih bersifat internal.

Oleh sebab itu, Giddens memahami struktur tidak disamakan dengan kekangan (*constraint*) namun selalu mengekang (*constraining*) dan membebaskan (*enabling*). Struktur adalah sebagai medium dan sekaligus sebagai hasil (*outcome*) dari tindakan-tindakan agen yang diorganisasikan secara berulang (*recursively*).

Giddens menempatkan aktor dan struktur dalam rentang ruang dan waktu yang saling berkontribusi dalam dinamika sosial yang terus bekerja. Oleh sebab itu menurut Giddens, produksi dan reproduksi praktik sosial dalam masyarakat harus dipahami sebagai pergalaran keahlian anggotanya, bukan hanya serangkaian proses yang mekanis (Giddens, 1976: 155-160). Bagi Giddens, dunia sosial terbentuk dan diproduksi melalui dan di dalam aktivitas manusia (Giddens, 1995: 234). Berdasarkan itu, Giddens mulai memperkenalkan konsepsi tentang agensi, yaitu individu sebagai aktor sosial yang memungkinkan dirinya selalu merefleksikan struktur sosial melalui praktik-praktik sosial yang melibatkannya.

Inti dari teori strukturasi adalah konsep tentang struktur, sistem dan dualitas itu sendiri (Giddens, 1984: 16). Giddens memberikan perbedaan antara struktur dan sistem sosial. Sistem sosial merupakan praktik-praktik sosial berupa relasi diantara aktor atau kelompok aktor yang diproduksi sepanjang waktu dan tempat. Dengan demikian, suatu sistem sosial dibentuk dari berbagai praktik yang disituasikan. Sementara struktur hanya memiliki eksistensi virtual yang menjadi momen keberulangan ketika produksi dan reproduksi sistem sosial terjadi (Giddens, 1981: 26). Strukturasi merujuk pada kondisi-kondisi yang dibangun dalam kontinuitas struktur, karenanya membentuk suatu sistem sosial. Dalam teori strukturasi yang digagas Giddens, agen atau aktor memiliki tiga tingkatan kesadaran: *pertama*, motif

atau kognisi tidak sadar (*unconscious motives/cognition*). Motif lebih merujuk ke potensial bagi tindakan, daripada cara (*mode*) tindakan itu dilakukan oleh si agen. Motif hanya memiliki kaitan langsung dengan tindakan dalam situasi yang tidak biasa, yang menyimpang dari rutinitas; *kedua*, kesadaran diskursif (*discursive consciousness*) yaitu apa yang mampu dikatakan atau diberi ekspresi verbal oleh para aktor, tentang kondisi-kondisi sosial, khususnya tentang kondisi-kondisi dari tindakannya sendiri. Kesadaran diskursif adalah suatu kemawasdirian (*awareness*) yang memiliki bentuk diskursif. Kesadaran diskursif menyangkut kemampuan memberikan alasan mengapa suatu tindakan perlu dilakukan kembali atau mungkin dilakukan ulang. (Giddens, 1984: 45); *ketiga*, kesadaran praktis (*practical consciousness*), yaitu apa yang aktor ketahui (*percayai*) tentang kondisi-kondisi sosial, khususnya kondisi-kondisi dari tindakannya sendiri. Kesadaran praktis terkait dengan stok pengetahuan yang secara implisit digunakan olah agen dalam bertindak maupun mengartikan tindakan yang lain, di mana pelaku tidak memiliki kemampuan untuk mengartikan rasionalisasinya secara diskursif. *Knowledgeabilitas* dalam kesadaran praktis dapat diartikan dengan pengertian sehari-hari sebagai kebiasaan atau rutinitas sehari-hari yang tidak dipertanyakan lagi (Giddens, 1982: 31).

Selain teori strukturasi, untuk menjelaskan prosesi loyalitas, disiplin dan militansi prajurit TNI sebagai kekuasaan yang mendominasi dan "menindas", penelitian ini juga menggunakan kerangka teori *habitus* dari Pierre Bourdieu (1986). Pemikiran Bourdieu dibangun di atas empat konsep utama: *habitus*, *capital*, *field* dan *doxa*. Kosep *pertama* tentang *habitus*, dapat dirumuskan sebagai sebuah sistem disposisi-disposisi (skema-skema persepsi, pikiran, dan tindakan yang diperoleh dan

bertahan lama). Agen-agen individual mengembangkan disposisi-disposisi ini sebagai tanggapan terhadap kondisi-kondisi obyektif yang dihadapinya dan melingkupinya. Dengan cara ini, Bourdieu membuat kesimpulan tentang penanaman struktur sosial obyektif ke dalam pengalaman mental dan subyektif dari si agen sebagai aktor sosial. Dalam hal ini habitus dihasilkan dan diproduksi secara tidak sadar, tanpa ada tujuan disengaja terhadap hubungan, tanpa ada konsentrasi yang sadar (Bourdieu, 1984: 170).

Konsep penting *kedua* yang dikenalkan Bourdieu adalah *field* (ranah). Sebagai ganti analisis masyarakat lewat konsep kelas yang sebelumnya gagasan Marx, Bourdieu menggunakan konsep ranah (*field*), yakni sebuah arena sosial di mana orang bermanuver dan berjuang dalam mengejar sumberdaya yang didambakan. Ranah merupakan berbagai arena sosial dan institusi dimana manusia mengekspresikan dan mereproduksi sikap mereka, dan dimana mereka berkompetisi untuk distribusi berbagai jenis kapital (Gaventa, 2003: 6). Dengan demikian sebuah ranah adalah sebuah jaringan, struktur atau sekumpulan hubungan yang dapat berupa intelektual, agama, edukasi, budaya, dan selainnya (Navarro, 2006: 18).

Konsep penting *ketiga* adalah mengenai *capital* (modal), yang diperlebar melampaui gagasan aset material kapital yang dapat berupa modal sosial, modal budaya, atau modal simbolik (Bourdieu, 1986: 241-258). Bourdieu meluaskan gagasan modal (*capital*) ke kategori-kategori seperti modal sosial, modal budaya, dan modal simbolik. Bagi Bourdieu, setiap individu menempati suatu posisi dalam ruang sosial multidimensional. Ruang itu tidak didefinisikan oleh keanggotaan kelas sosial, namun melalui jumlah setiap jenis modal yang ia miliki. Modal itu mencakup nilai jejaring sosial, yang bisa digunakan

untuk memproduksi atau mereproduksi ketidaksetaraan.

Konsep penting *keempat* dalam pemahaman kekuasaan Boerdieu adalah *doxa*. *Doxa* merupakan kombinasi antara norma dan kepercayaan ortodoks dan heterodoks melalui asumsi yang tidak terucapkan. *Doxa* terjadi ketika agen melupakan batas yang telah memunculkan pembagian tidak adil dalam masyarakat. Ia adalah ketaatan pada hubungan urutan di mana, karena struktur, mereka tidak terpisahkan di dunia nyata, dan dunia pikiran diterima sebagai bukti keberadaan diri (Bourdieu, 1984: 472).

Walaupun ini mungkin terdengar abstrak, teori Bourdieu membumi dengan kuat dalam berbagai penelitian sosiologis dan pada berbagai isu sosial. Analisis yang mendalam terhadap pemikiran Bourdieu dapat membantu membuka hubungan kekuasaan yang telah dianggap tidak terlihat oleh *habitus* dan salah-pemahaman (Navarro, 2006: 19). Bourdieu menawarkan sosiologi refleksif—di mana seseorang mengenali bias, kepercayaan dan asumsi seseorang dalam pembentukan akal—jauh sebelum refleksifitas menjadi tren. Pengetahuan kritik-diri yang membuka sumber kekuasaan dan menyingkap alasan yang menjelaskan asimetri dan hirarki sosial dapat menjadi alat yang kuat untuk meningkatkan emansipasi sosial (Navarro, 2006: 15-16).

Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan analisis kritis yang secara praktis menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengkaji persoalan kultur dalam institusi TNI, dengan fokus pada TNI Angkatan Darat (TNI AD). Agar penelitian menjadi lebih mendalam pada proses pembentukan kultur tersebut maka penelitian ini menggunakan arkeologi kekuasaan yang berupa pengetahuan atau pemahaman

seperti relasi-relasi pada sebuah realitas yang membentuk kultur prajurit TNI AD. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif sebagai data primer dan beberapa data yang terkait dengan angka-angka sebagai data pendukung untuk memperlancar penelitian ini walaupun jumlahnya relatif kecil.

Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk memperoleh *external validity*, melainkan lebih bertujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai suatu realitas dalam konteksnya yang spesifik. Oleh karena itu, studi yang dilakukan merupakan suatu *multi-level analysis*, tidak terbatas hanya pada satu jenjang analisis dan metode tertentu saja. Oleh sebab itu pula, data yang digunakan adalah data yang bersifat kualitatif karena data-data yang tersaji dikumpulkan dengan cara-cara pengumpulan data yang lazim digunakan dalam pengumpulan data yang bersifat kualitatif, khususnya observasi, wawancara mendalam dan studi dokumentasi serta diskusi kelompok yang terencana khusus membahas topik tentang data yang akan dikumpulkan atau *Focused Group Discussion* (FGD).

Data yang terkumpul dikompilasi secara tematik berdasarkan informasi yang diperoleh. Kompilasi data dilakukan melalui pemilahan yang relevan dengan masalah penelitian. Pada tahap ini, peneliti akan melakukan pendalaman dengan cara masuk ke alam kesadaran subyek (*contemplating the content of mind*) berupa: mengingat (*remembering*), meresapi (*perceiving*), dan mengingini (*desiring*).

Ketiga hal tersebut memiliki keterarahan (*directedness*) pada hal yang disebut dengan intensionalitas (*intentionality*), yaitu kultur prajurit TNI AD sebagai pokok masalah penelitian.

Bagian akhir dari metode analisis data adalah mencari dan menemukan interelasi dan koherensi data dari lapangan yang digali dari sumber penelitian berupa keyakinan, pandangan-pandangan atau prasangka teoritik. Pada akhirnya, analisis dengan pemikiran yang bersifat reflektif akan menemukan nilai-nilai yang ada di balik makna-makna (*meanings*) di sekitar kultur prajurit TNI.

Menuju Profesionalisme TNI

Perbincangan mengenai TNI telah berlangsung cukup lama dan terus menjadi tema yang menarik untuk didiskusikan. Perbincangan tersebut berkisar seputar isu struktur, doktrin dan kultur TNI.³ Secara umum, para ahli memperbincangkan dinamika yang terjadi di tubuh TNI sejak digulirkannya reformasi. Diskusi tentang isu ini lebih hangat ketika reformasi dimulai. Reformasi yang bergulir untuk melengserkan pemerintahan Soeharto telah mengundang perhatian para ahli, khususnya yang terkait dengan reformasi TNI. Salah satu tuntutan atau isu utama reformasi adalah perubahan pada peran TNI. TNI dituntut untuk lebih profesional dengan meninggalkan dwifungsinya, yang berarti bahwa TNI harus berada di luar sistem pemerintahan.

Diskusi tentang dwifungsi⁴ TNI merupakan perbincangan tentang fungsi

³ TNI sebagai lembaga militer resmi di Indonesia memiliki struktur, doktrin dan kultur sendiri. Untuk lebih jelas mengenai struktur dan doktrin TNI, silahkan lihat website TNI: <http://www.tni.mil.id/>

⁴ Pada era Orba dikenal istilah Dwifungsi ABRI atau dua fungsi yang dijalankan oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yaitu fungsi sosial dan fungsi politik. Fungsi sosial dan politik ini memberi peluang, bahkan mendorong prajurit ABRI pada saat itu untuk melakukan fungsi-fungsi langsung dalam masyarakat menjadi tokoh sosial dan tokoh politik yang melakukan kegiatan politik praktis dan mengendalikan kegiatan sosial dalam masyarakat. Dengan Dwifungsi ABRI tersebut, prajurit TNI telah beralih dari fungsi tentara menjadi fungsi sosial dan politik yang menandai keluarnya TNI dari fungsi profesionalnya sebagai prajurit TNI.

militer yang juga telah dibincangkan oleh para ahli internasional. Samuel P. Huntington (1952) telah memberikan catatan penting. Menurutnya, institusi militer di lingkungan masyarakat manapun dibentuk oleh dua kebutuhan. Pertama, kebutuhan terhadap kepentingan fungsional yang berasal dari beragam ancaman terhadap keamanan masyarakat atau wilayah. Kedua, kepentingan sosial yang muncul dari kekuatan sosial, ideologi dan berbagai institusi dominan dalam masyarakat. Sangat jelas penekanan Huntington mengenai institusi militer. Dalam konteks TNI di Indonesia, kedua faktor pendukung keberadaan militer tersebut terakumulasi dalam sistem pemerintahan. Maka kiranya sejalan dengan apa yang pernah terjadi di Indonesia di mana TNI memerankan dua fungsi yang dikenal dengan dwifungsi ABRI pada zaman Orde Baru, sebelum Reformasi.

Dwifungsi yang dijalankan TNI pada era Orde Baru menjadikannya sebagai institusi yang mendukung kelanggengan kekuasaan penguasa. Soeharto sebagai panglima tertinggi negara membentuk institusi TNI sebagai penyangga kekuasaan. TNI telah menjadi bagian yang solid dengan pemerintah. TNI berada di dalam sistem pemerintahan dan aktif dalam politik praktis. Dengan dwifungsinya, TNI telah merambah beberapa lahan yang dijadikan sumber 'penghasilan'. Bisnis salah satu kegiatan TNI yang banyak membantu kesejahteraan institusi dan personil. Dengan bisnis yang dijalankan, TNI mampu berkontribusi dalam pendanaan internal dalam memenuhi kebutuhan institusi. Peran sosial politik TNI pada era Orde Baru menjadikan TNI berkiper di atas peran yang semestinya dijalankan oleh sipil.

Setelah reformasi bergulir, salah satu tujuan utama tuntutan perubahan di negeri ini adalah perubahan institusi TNI. TNI harus meninggalkan dwifungsinya. TNI harus berkonsentrasi pada tugas pokoknya sebagaimana yang digariskan dalam konstitusi. Reformasi menuntut perubahan pada semua sektor, seperti politik, sosial, budaya (kultur), dan lain-lain. Dengan demikian, TNI dituntut untuk menjadi profesional dengan mengedepankan tugas pokok yang diembannya sebagai alat pertahanan negara. TNI tidak boleh lagi berbisnis dan aktif dalam politik praktis.⁵

Tidak jauh berbeda dengan pandangan Huntington mengenai profesionalisme militer, Samuel E. Finer (1962) menegaskan bahwa membangun tentara profesional harus dilakukan dengan memberikan porsi yang tepat kepada militer perihal kewajibannya mempertahankan kedaulatan negara. Finer yakin apabila militer tidak diberikan tanggung jawab dalam porsi yang tepat, maka profesionalisme tentara akan ternodai oleh kepentingan sepihak dari perwira-perwira, yang keluar dari peran dan fungsi tentara; alat pertahanan negara. Sebab, fungsi utama dari militer menurutnya adalah bertempur dan memenangkan peperangan guna mempertahankan dan memelihara eksistensi negara.

Sementara, studi ilmiah terhadap profesionalisme militer Indonesia secara antropologis (*cultural*) dilakukan oleh Peter Britton (1996). Britton berhasil merekonstruksi profesionalisme TNI berdasarkan telaah terhadap TNI-AD. Menurut Britton, profesionalisme prajurit TNI tidak ditentukan oleh sistem pendidikan dan pelatihan yang dikembangkan oleh institusi TNI. Studi antropologis Britton

⁵ Pada masa Orba disinyalir bahwa terjadi praktik-praktik menyimpang yang dilakukan oleh oknum prajurit TNI dengan melakukan kerjasama bisnis dan aktif berpolitik. Praktik-praktik tersebut mendorong keterlibatan institusi-institusi TNI yang menjadi perbincangan.

menjelaskan prajurit TNI yang profesional adalah tentara yang memposisikan dirinya di atas semua golongan, berperan sebagai penyelamat nasional yang bertugas untuk memulihkan integritas nasional dan sekaligus sebagai kekuatan modernisasi yang efisien. Para perwiranya bertindak sebagai satria yang merupakan perwujudan dari sifat bijaksana dan integritas moral yang tinggi. Selain itu, Britton juga melihat kuatnya pengaruh budaya Jawa dalam pembentukan kultur prajurit. Budaya yang dimaksud adalah budaya yang berkembang dalam kultur prajurit yang berada pada masa kerajaan Jawa masa lalu, terutama kerajaan Mataram kuno. Alasannya, Mataram merupakan salah satu kerajaan yang berada pada awal era kolonialisme di Indonesia dan pasukannya terlibat peperangan melawan pihak penjajah. Selain itu, pada saat perang kemerdekaan sejumlah daerah pusat kerajaan Mataram menjadi basis pasukan pejuang kemerdekaan terpenting.

Muhadjir Effendy (2008) juga banyak menyoroti tentang profesionalisme TNI. Menurutnya, pada era Orde Baru, TNI bukan lagi alat negara yang mengabdikan pada konstitusi, tetapi alat negara yang mengabdikan pada kekuasaan. TNI harus diubah karena pada era keemasannya ia telah merambah terlalu jauh ke bilik-bilik yang menjadi ranah sipil. Keterlibatan militer yang terlalu jauh seperti yang pernah terjadi membuat anatomi negara dalam bentuk otoriter. Anatomi negara dalam bentuk otoriter salah satu sumbernya adalah keterlibatan TNI dalam politik. Dalam pemaparannya, Effendy menegaskan bahwa kesuksesan militer menguasai institusi pemerintahan tidak lepas dari peran politik praktis yang diporsikan pada militer sebelum reformasi. Effendy

memberikan jawaban terhadap persoalan kesuksesan militer berkorporasi di atas sipil pada era Orde Baru. Hal ini menunjukkan pentingnya sebuah komunikasi dalam mewujudkan sebuah misi/tujuan.

Pada sisi lain, Muhadjir Effendy (2008) juga mengakui adanya faktor penghambat dalam pencapaian profesionalitas dalam TNI. Menurutnya, menuju ke sebuah institusi yang profesional membutuhkan waktu yang lama. Profesionalisme TNI tidak dapat ditempuh dengan hanya mengandalkan tuntutan konstitusi. Ia harus didukung oleh proses perubahan kultur TNI sendiri yang pernah *mandeg*. Perubahan harus dimulai dari proses pembentukan kembali kultur dalam konteks sosial dan politik yang membutuhkan waktu yang panjang untuk mewujudkannya. Konstitusi telah mendukung penuh perubahan TNI ke arah yang lebih profesional. Namun demikian, Effendy mengakui bahwa keprofesionalan TNI tidak cukup hanya melalui pembuatan peraturan-peraturan semata, termasuk pembenahan aspek pendidikan, alat utama sistem persenjataan (alutsista), dan pemenuhan kesejahteraan. Profesionalisme TNI harus dilandasi jati diri prajurit yang berwawasan luas dan memiliki visi yang jelas, berkompetensi di bidangnya, menjunjung tinggi moral, dan menjunjung tinggi Doktrin Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.⁶ Yang menjadi catatan penting Effendy adalah, kesejahteraan prajurit harus terpenuhi terlebih dahulu untuk mencapai profesionalisme TNI.

Connie Rahakundini Bakrie (2007) menyoroti sisi lain institusi militer di Indonesia. Bakrie mengakui adanya komitmen yang tinggi kalangan TNI melakukan perubahan dalam lingkup internalnya. Namun, besarnya tuntutan sipil terhadap

⁶ Untuk lebih jelas mengenai informasi tentang Doktrin Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, silahkan lihat di website TNI: <http://www.tni.mil.id/>

perubahan fungsi dan peran TNI tidak diimbangi oleh solusi yang bersifat komprehensif. Dalam kaitannya dengan profesionalisme TNI, Bakrie memberikan dua penekanan penting persoalan yang mendasar untuk mewujudkan profesionalisme tersebut; persoalan perumusan kebijakan dan persoalan anggaran pertahanan negara yang masih minim. Kedua persoalan tersebut merupakan persoalan yang harus direspons oleh pemerintah.

Lebih jauh dalam pemaparannya, Bakrie menggarisbawahi bahwa membangun postur TNI yang ideal dalam rangka menyangga pertahanan negara merupakan persoalan yang kompleks. Ia tidak mungkin dijawab hanya mengukur variabel ancaman dan kemampuan negara. Ia membutuhkan telaah komprehensif karena di dalamnya juga menyangkut persoalan dinamika sosial, politik, dan ekonomi. Yang sering dilakukan selama ini adalah meramalkan anggaran pertahanan negara tanpa berupaya mewujudkan dan menyelesaikan persoalan klasik tersebut. Pertahanan negara sangat terkait dengan kemampuan negara untuk mengalokasikan anggaran. Dengan demikian, postur TNI yang ideal akan terwujud jika kebutuhan pertahanan terpenuhi. Di sini, Bakrie memaparkan pentingnya pemerintah membangun sistem pertahanan yang tangguh dan profesional agar tidak dilecehkan oleh negara lain (Bakrie, 2007).

Studi-studi di atas menunjukkan bahwa terdapat keinginan yang kuat oleh masyarakat luas agar TNI menjadi institusi yang mengemban tugas pokoknya sebagai alat pertahanan negara. Pendapat-pendapat tersebut menegaskan tiga hal penting: pertama, pemerintah harus merumuskan kebijakan yang mementingkan pertahanan negara. TNI harus profesional dengan memusatkan perhatiannya pada persoalan pertahanan negara; kedua, anggaran pertahanan negara sangat

minim yang berdampak pada terbatasnya upaya membangun postur TNI yang ideal; ketiga, personil TNI dituntut bersikap profesional dengan menjunjung tinggi etika dan moral. TNI diharapkan menjadi institusi negara yang mampu memberikan rasa aman terhadap pertahanan negara terhadap berbagai macam ancaman.

Paparan hasil tudy-study tersebut menunjukkan adanya perhatian serius dari kalangan akademisi menyikapi persoalan kinerja dan profesionalisme TNI selama ini. Berbagai kritik yang bersifat konstruktif membuka kemungkinan pembenahan institusi TNI menjadi lebih baik ke depan. Namun demikian, yang luput dari perhatian para ahli adalah persoalan perubahan pada kultur TNI. Selama ini yang banyak mendapat sorotan publik adalah perubahan pada struktur dan doktrin TNI tanpa melihat dengan seksama persoalan kultur TNI. Padahal, persoalan kultur adalah merupakan persoalan yang urgen karena menyangkut etika dan moral personil TNI.

Persoalan lain yang tidak mendapat perhatian adalah solusi atau tawaran penyelesaian terhadap pembentukan institusi ideal TNI. Para ahli bahkan hanya fokus pada pembenahan institusi tanpa memberikan solusi yang tepat untuk mewujudkan kultur ideal TNI yang menjadi kunci terciptanya profesionalisme. Profesionalisme TNI tidak akan dicapai tanpa adanya strategi yang komprehensif karena persoalan tersebut tidak berdiri sendiri. Profesionalisme TNI sangat terkait dengan perubahan doktrin, pembenahan persenjataan, pengalokasian anggaran, dan pembenahan mental prajurit (kultur).

Membangun kultur TNI merupakan tuntutan konstitusi. UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI menandakan bahwa TNI harus mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil dan hak asasi manusia. Kultur TNI yang dimaksud di sini tidak

hanya mencakup sikap, tindakan, dan perilaku anggota TNI, tetapi harus menyentuh mental dan pola pikir TNI. Dengan demikian akan terbentuk anggota TNI yang tangguh, solid, profesional, militan, tahan menderita, disiplin, bertanggung-jawab, tidak mudah menyerah dan dekat dengan rakyat. Jadi, kultur yang diinginkan bukan hanya pada persoalan budaya, tetapi mencakup lebih luas lagi, yakni pola pikir atau *mindset* anggota TNI.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi sangat penting dan dibutuhkan oleh NKRI, khususnya institusi TNI, karena berusaha merespon persoalan-persoalan tersebut. Profesionalisme TNI harus diiringi oleh perubahan kultur yang selama ini 'terabaikan'. Strategi-strategi pembentukan kultur TNI juga menjadi fokus selanjutnya penelitian ini. Strategi dibutuhkan untuk mendukung upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah melalui konstitusi dalam menciptakan kultur TNI yang ideal. Kultur TNI yang ideal merupakan salah satu elemen penting yang harus mendapat perhatian serius pimpinan TNI dan pemerintah karena sangat terkait dengan persoalan mental dan pola pikir prajurit yang terlibat langsung dalam pertahanan negara.

Penutup

Reformasi kultur prajurit TNI bersifat inheren, artinya reformasi tersebut muncul bukan karena desakan dari luar, sebab desakan dari luar memang diarahkan pada institusi TNI. Hal ini terjadi karena dua sebab: *pertama*, kekeliruan TNI pada masa lalu adalah kekeliruan institusional bukan personal. Jika ada kekeliruan personal itu merupakan akibat tidak langsung dari

kekeliruan institusional; *kedua*, dengan sistem komando yang kuat, persoalan kultur prajurit TNI yang menyimpang dapat di benahi melalui sistem yang tersedia. Jadi, reformasi struktural (institusional) dinilai memiliki kemampuan membentuk reformasi kultural prajurit TNI. Padahal dua hal tersebut terpisah dan berada pada *field* yang berbeda. Institusional TNI berada pada ranah sosiologis yang luas dan terbuka, dia bersifat ekspansif dan eksternal karena bersentuhan dengan berbagai *stakeholders* sosial yang terkait dengan persoalan keamanan dan pertahanan. Sedangkan kultur prajurit TNI berada pada ranah personal yang sempit dan tertutup bersifat internal.

Reformasi kultur prajurit TNI tidak dapat hanya diserahkan atau disandarkan pada reformasi struktural/institusional. Artinya, reformasi struktural/institusional TNI tidak dapat menjamin terjadinya reformasi pada kultur prajurit TNI. Hal ini disebabkan proses pembentukan kultur TNI lebih pelik, tertutup dan melibatkan banyak variabel yang sulit diuraikan karena melibatkan kebudayaan masyarakat yang mengitarinya. Terdapat faktor-faktor tertutup seperti motivasi, kehormatan dan presepsi dalam diri setiap prajurit yang sulit diurai dan diselesaikan hanya melalui pendekatan struktural/institusional. Seandainya pendekatan struktural/institusional tersebut mampu membentuk profile kultur TNI yang ideal, hal itu merupakan kultur palsu prajurit atau kultur bentukan. Kultur yang tidak muncul dari kesadaran penuh berasal dari dalam diri prajurit seperti pada masa peperangan memperebutkan dan mempertahankan kemerdekaan.

Bacaan

Buku

- Bakrie, Connie Rahakundini. 2007. *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal*. Jakarta: Obor.
- Bourdieu, Pierre. 1980. *The Logic of Practice*. Stanford: Stanford University Press.
- (1984). *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste*. London: Routledge.
- (1986). *The Forms of Capital*. *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Capital*. J. G. Richardson. New York: Greenwood Press.
- Britton, Peter. 1996. *Profesionalisme dan Ideologi Militer, Perspektif Tradisi-tradisi Jawa Barat*. Jakarta: LP3S.
- Campbell, Tom. 1994. *Seven Theories of Human Society*. Oxford: Clarendon Press.
- Effendy, Muhadjir. 2008. *Profesionalisme Militer: Profesionalisme TNI*. Malang: UMM Press.
- Finer, Samuel E. 1962. *The Man of Horseback: The Role of Military in Politics*. New York: Preager.
- Gaventa, J. 2003. *Power After Lukes: A Review of the Literature*. Brighton: Institute of Development Studies.
- Giddens, Anthony. 1976. *The New Rules of Sociological Method: A Positive Critique of Interpretative Sociologies*. London: Hutchinson of London.
- (1981). *A Contemporary Critique of Historical Materialism. Vol. 1. Power, Property and the State*. London: Macmillan.
- (1982). *Profile and Critiques in Social Theory*. Berkeley: University of California Press.
- (1984). *The Constitution of Society*. Cambridge: Polity Press.
- (1995). *Politics, Sociology and Social Theory*. California: Stanford University Press.
- (1999). *Runaway World: How Globalization is Reshaping Our Lives*. London: Profile.
- Huntington, Samuel P. 1952. *The Clash of Civilization and the Remaking of World Order*. New York: Simon and Schuster.
- Jhonson, Doyle Paul. 1981. *Classical Founders and Contemporary Theory*. New York: John Wiley and Sons.
- Navarro, Z. 2006. *Search of a Cultural Interpretation of Power: The Contribution of Pierre Bourdieu* dalam Brighton: Institute for Development Studies Buletin Vol. 37.

Veegar, KJ. 1993. *Realitas Sosial; Refleksi Masyarakat Sosial atas Hubungan Individu-Masyarakat dalam Cakrawala Sosiologi*. Jakarta: Gramedia.

Undang-Undang

Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI

Internet

<http://www.tni.mil.id/>